

Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian di Kawasan Minapolitan Provinsi Jawa Timur

¹ Siti Nurafiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

² Endah Kurnia Lestari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

³ Siti Komariyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

Informasi Naskah

Submitted: 7 November 2019

Revision: 16 April 2020

Accepted: 20 April 2020

Kata Kunci:

Sub sektor perikanan, sektor basis, keunggulan kompetitif

Abstract

Fisheries are all activities related to the management, utilization of fish resources, and their environment, including production, processing, and marketing operations carried out in a fisheries business. The purpose of this study was to analyze the growth and potential of the district fisheries sub-sector in the Minapolitan Region of East Java Province. The analytical method used in this study is Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), and Shift Share Esteban Marquillas (SS-EM). The Location Quotient (LQ) analysis showed that from 2012 to 2016 district with the highest average LQ was the Lamongan District (LQ 7.81). The Dynamic Location Quotient (DLQ) analysis showed that the area with the highest potential/competitiveness in the future is Blitar (DLQ 1.40). The study of the Shift Share Esteban Marquillas showed that all of the districts in Minapolitan Region of East Java Province had a specialization in the fisheries sub-sector. The highest average of specialization was Lamongan Regency (Specialization 3.444,25), and the most top competitive advantage was Tuban Regency (Competitive advantage 3,006382).

Abstrak

Perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, termasuk kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran yang dilakukan dalam bisnis perikanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan dan potensi sub-sektor perikanan kabupaten di Wilayah Minapolitan Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), dan Shift Share Esteban Marquillas (SS-EM). Analisis Location Quotient (LQ) menunjukkan bahwa dari tahun 2012 hingga 2016 kabupaten yang memiliki rata-rata LQ tertinggi adalah Kabupaten Lamongan (LQ 7.81). Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) menunjukkan bahwa kabupaten dengan potensi / daya saing tertinggi di masa depan adalah Blitar (DLQ 1,40). Analisis Shift Share Esteban Marquillas menunjukkan bahwa semua kabupaten di Wilayah Minapolitan Provinsi Jawa Timur memiliki spesialisasi sub sektor perikanan. Rata-rata spesialisasi tertinggi adalah Kabupaten Lamongan (Spesialisasi 3,444,25) dan keunggulan kompetitif tertinggi adalah Kabupaten Tuban (Keunggulan kompetitif 3,006382).

* *Corresponding Author.*

Siti Nurafiah, e-mail: nurafiahs21@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.23960/jep.v9i1.62>

PENDAHULUAN

Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan terhadap sumberdaya ikan maupun lingkungannya yang meliputi kegiatan produksi, pengolahan hingga pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan (UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (2016), Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah seluas 47.799,75 km² dengan panjang garis pantai terpanjang di pulau Jawa yaitu sepanjang 3.498,12 km. Selain luas wilayah yang dimiliki, Jawa Timur merupakan provinsi dengan angka konsumsi ikan tertinggi ketiga setelah Provinsi DIY, dan Bengkulu di Indonesia. Menurut Data Statistik, dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (2015), angka pertumbuhan konsumsi ikan Jawa Timur pada tahun 2013-2014 mencapai 14,02 persen di tingkat nasional.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Jawa Timur, besarnya potensi dan konsumsi ikan ternyata belum diikuti dengan pemanfaatan sub sektor secara optimal. Menurut hasil penelitian Huda dan Firdaus. (2012), tingkat pemanfaatan perikanan laut maupun penggunaan lahan budidaya masih rendah. Berdasarkan perkembangan PDRB Atas Harga Konstan Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016, sub sektor perikanan hanya berkontribusi sebesar 16,36 hingga 18,61 persen. Meskipun terus mengalami peningkatan, kontribusi tersebut masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan sub sektor pertanian yang berkontribusi hingga mencapai 77 persen.

Permasalahan terkait pengelolaan potensi kelautan dan perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat diatasi dengan adanya Revolusi Biru atau *Blue Economy*. Menurut hasil penelitian Apriliana (2014), *Blue Economy* merupakan suatu konsep yang menjelaskan suatu kegiatan ekonomi berbasis kelautan dengan memberdayakan potensi kelautan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan tetap melindungi kelestarian laut melalui pengembangan Kawasan Minapolitan. Pembentukan Kawasan Minapolitan Provinsi Jawa Timur diputuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Kabupaten/kota yang termasuk ke dalam Kawasan Minapolitan adalah Kabupaten Blitar, Trenggalek, Lamongan, Gresik, Malang, Tulungagung, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, Pacitan, Tuban, Sumenep, dan Kota Probolinggo.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat rumusan masalah yang ingin dicapai yaitu dimana saja konsentrasi spasial sub sektor perikanan di Kawasan Minapolitan pada tahun 2012-2016 dan bagaimana potensi daya saing sub sektor tersebut di masa yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persebaran wilayah kabupaten/kota mana saja yang memiliki sub sektor unggulan di bidang perikanan pada tahun 2012-2016 dan mengetahui potensi daya saing sub sektor perikanan di masa depan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh sub sektor perikanan di kawasan Minapolitan Provinsi Jawa Timur. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur (2017), Badan Pusat Statistik (BPS) masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan, ataupun data bersumber dari instansi lainnya dan internet. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis *Location Quotient* digunakan untuk menghitung perbandingan antara besarnya peranan suatu sub sektor pada daerah kabupaten/kota terhadap besarnya sub sektor provinsi. Penelitian ini menggunakan perbandingan antara sub sektor perikanan di kabupaten/kota terhadap sub sektor Provinsi Jawa Timur. Adapun rumus perhitungan *Location Quotient* (LQ) menurut Richardson dalam Tarigan (2005) adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{x_i}{y_i} / \frac{X_i}{Y_i}$$

Keterangan :

xi : Nilai tambah sub sektor perikanan di kabupaten/kota

yi : PDRB kabupaten/kota

Xi : Nilai tambah sub sektor perikanan di provinsi Jawa Timur

Yi : PDRB Provinsi Jawa Timur

Nilai hasil LQ yang dihasilkan dapat diartikan sebagai:

- Jika $LQ > 1$, maka disebut basis, yaitu sub sektor perikanan di wilayah kab/kota yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi daripada tingkat wilayah Provinsi Jawa Timur,
- Jika $LQ < 1$, maka disebut non basis, yaitu sub sektor perikanan di wilayah kab/kota yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari pada tingkat wilayah Provinsi Jawa Timur,
- Jika $LQ = 1$, maka tingkat spesialisasi di wilayah kab/kota sama dengan tingkat wilayah Provinsi Jawa Timur.

Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Analisis DLQ berfungsi untuk menggambarkan laju pertumbuhan pada masa yang akan datang dengan asumsi bahwa setiap pertambahan PDRB atau nilai suatu sektor mempunyai rata-rata laju pertumbuhan yang berbeda setiap tahun selama kurun waktu tahun awal dan tahun berjarak.

$$\text{Persamaan DLQ dapat dituliskan: } DLQ = \frac{\frac{1+g_j}{1+G_j}}{\frac{1+g_i}{1+G_i}}$$

Keterangan:

DLQ : Koefisien DLQ

g_j : rata-rata laju pertumbuhan sub sektor perikanan di kab/kota

g_i : rata-rata laju pertumbuhan PDRB kab/kota

G_i : rata-rata laju pertumbuhan sub sektor perikanan di Provinsi Jawa Timur

G_J : rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur

Nilai DLQ dapat diartikan apabila:

- $DLQ > 1$, maka sub sektor perikanan masih berpotensi menjadi sektor basis di masa yang akan datang,
- $DLQ < 1$, maka sub sektor perikanan tidak berpotensi menjadi sektor basis di masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan potensi dan daya saing sub sektor perikanan pada masing-masing kabupaten/kota di Kawasan Minapolitan Provinsi Jawa Timur pada masa yang akan datang. Menurut analisis *Location Quotient* (LQ) terdapat 11 kabupaten/kota yang termasuk ke dalam wilayah basis dan 3 kabupaten/kota bukan basis. Daerah yang memiliki rata-rata LQ tertinggi adalah Kabupaten Lamongan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 7,81.

Berdasarkan analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) terdapat 11 kabupaten/kota yang berpotensi memiliki daya saing di masa yang akan datang dan 3 kabupaten/kota yang tidak berpotensi. Daerah yang memiliki potensi terbesar adalah Kabupaten Blitar dengan nilai DLQ sebesar 1,41. Hasil analisis LQ dan DLQ dapat dilihat pada Tabel 2.

Klasifikasi hasil analisis dibedakan menjadi empat kategori. Kategori pertama sub sektor perikanan termasuk ke dalam sub sektor basis dan berpotensi. Kategori kedua termasuk ke dalam sub sektor basis namun tidak berpotensi. Kategori ketiga termasuk non basis namun berpotensi di masa depan. Dan kategori keempat sub sektor perikanan termasuk ke dalam kategori non basis dan non potensial. Pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa terdapat 9 daerah yang termasuk ke dalam kategori pertama. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan dan

pembangunan sub sektor perikanan pada daerah tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya. Keberhasilan pembangunan sub sektor perikanan pada masing-masing daerah tidak lepas dari beberapa faktor pendukung. Selain besarnya potensi yang dimiliki, kemampuan sub sektor yang menghasilkan basis dan berpotensi berdaya saing pada masa yang akan datang juga didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, dan kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan perikanan budidaya dan tangkap.

Tabel 1.
Penggabungan Analisis LQ dan DLQ Sub Sektor Perikanan Kabupaten/Kota Kawasan Minapolitan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota	LQ	DLQ	Klasifikasi	Kategori
a. Pacitan	3,70	1,12	Basis, Berpotensi	1
b. Trenggalek	3,29	1,35	Basis, Berpotensi	1
c. Tulungagung	1,31	1,30	Basis, Berpotensi	1
d. Blitar	2,03	1,41	Basis, Berpotensi	1
e. Malang	0,78	1,29	Non Basis, Berpotensi	3
f. Banyuwangi	3,89	1,14	Basis, Berpotensi	1
g. Probolinggo	2,07	1,34	Basis, Berpotensi	1
h. Pasuruan	0,22	1,15	Non Basis, Berpotensi	3
i. Sidoarjo	0,64	0,99	Non Basis, Tidak Berpotensi	4
j. Tuban	2,04	1,36	Basis, Berpotensi	1
k. Lamongan	7,81	1,01	Basis, Berpotensi	1
l. Gresik	1,74	1,11	Basis, Berpotensi	1
m. Sumenep	5,89	0,79	Basis, Tidak Berpotensi	2
n. Kota Probolinggo	1,65	0,51	Basis, Tidak Berpotensi	2

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2018), diolah

Daerah yang termasuk ke dalam kelompok kedua yaitu Kabupaten Sumenep dan Kota Probolinggo. Menurut Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep (2017), hambatan yang mempengaruhi pertumbuhan sub sektor perikanan adalah masih terbatasnya kemampuan maupun keahlian sumberdaya manusia, kurangnya sarana penegakan hukum yang mengakibatkan sering terjadinya penangkapan ilegal dan bentrok antar nelayan, dan masih minimnya modal, serta dukungan peralatan tangkap maupun budidaya yang digunakan. Sedangkan untuk daerah Kota Probolinggo, pembangunan sub sektor perikanan sudah didukung oleh adanya berbagai fasilitas pendukung seperti Pelabuhan Nusantara, balai benih ikan, dan armada penangkapan ikan. Meskipun terdapat berbagai fasilitas pendukung, hasil produksi sub sektor perikanan masih tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lainnya. Faktor kendala yang dihadapi adalah minimnya lahan budidaya maupun tangkap. Menurut data dari Pemkot Probolinggo (2016), Kota probolinggo memiliki luas wilayah sebesar 56,67 km² atau hanya sebesar 3,23 persen dari total luas kabupaten dan kota Probolinggo. Panjang garis pantai sepanjang 7 km yang berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara.

Daerah yang termasuk ke dalam kategori ketiga adalah Kabupaten Pasuruan (2017). Pada perkembangannya, sub sektor perikanan didukung dengan adanya penerapan teknologi, sarana dan prasarana, dan beberapa program yang diberlakukan pada wilayah potensial. Hal yang mendasari sub sektor masih belum termasuk ke dalam klasifikasi basis adalah adanya peningkatan jumlah industri yang mempengaruhi jumlah lahan pertanian maupun perikanan budidaya. Menurut BPS Jatim, jumlah industri terus mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2015, jumlah industri besar dan sedang di Kabupaten Pasuruan adalah sebanyak 811 industri. Jumlah lahan akan terus mengalami penipisan apabila tidak diikuti dengan kebijakan yang berkaitan dengan upaya pertahanan lahan pertanian maupun perikanan budidaya.

Kategori selanjutnya adalah kategori keempat. Daerah yang termasuk ke dalam kategori tersebut adalah Kabupaten Sidoarjo. Menurut analisis LQ dan DLQ, sub sektor perikanan di Kabupaten Sidoarjo tidak termasuk ke dalam sub sektor basis dan tidak memiliki keunggulan di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah berkurangnya lahan tambak budidaya yang diakibatkan oleh bencana lumpur lapindo yang terjadi pada tahun 2006. Dampak ekonomi yang terjadi akibat luapan lumpur tersebut adalah

berkurangnya lahan pertanian dan tambak. Berdasarkan hasil *survey* oleh Suning (2012), kondisi pertanian terganggu karena kesulitan air bersih. Hasil buangan lumpur melalui Kali Alo mengganggu pertanian dan tambak di sebagian wilayah. Semenjak adanya pembuangan lumpur melalui sungai dan membanjiri sawah, hasil panen mengalami penurunan atau bahkan gagal panen. Pembudidaya ikan juga mengalami kemunduran produksi karena hasil tambak berkurang hingga lebih dari 50 persen. Seperti yang terjadi di Desa Plumbon, mayoritas penduduk adalah petani dan petambak. Luas area persawahan wilayah tersebut lebih luas dibandingkan dengan luas pemukiman. Semenjak adanya lumpur lapindo, pendapatan masyarakat terus berkurang karena sawah dan tambak sering terbanjiri oleh air yang dialirkan melalui sungai yang sewaktu-waktu dapat meluap apabila musim hujan.

Selain berkurangnya lahan tambak, pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2012-2016 masih belum optimal. Salah satu faktor penghambatnya adalah kualitas dan daya dukung dari infrastruktur yang kurang memadai seperti pusat pembenihan dan jalan produksi. Menurut hasil penelitian dari Hardaningrum (2015) mengatakan bahwa jalan produksi merupakan infrastruktur perikanan budidaya, khususnya bagi pembudidaya. Pada umumnya, kondisi wilayah di Kabupaten Sidoarjo memiliki perkerasan berupa tanah sehingga pada kondisi tertentu seperti hujan jalan tersebut tidak dapat diakses dan mengakibatkan tingginya biaya operasional usaha budidaya. Biaya tersebut dipergunakan untuk biaya angkut material pakan, pupuk, dan peralatan lainnya hingga angkut hasil produksi. Berkurangnya lahan budidaya juga dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah industri. Menurut data BPS Jawa Timur (2018), jumlah industri besar dan sedang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, jumlah industri besar dan sedang adalah sebanyak 953 industri. Sedangkan pada tahun 2016, jumlah industri mencapai 978 industri. Apabila tidak disikapi dengan tepat, perluasan area industri tentunya akan mempersempit lahan pertanian maupun budidaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan alat analisis *Location Quotient* (LQ), dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) *Share*, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis *Location Quotient* (LQ) menunjukkan bahwa selama periode tahun 2012-2016 terdapat 11 kabupaten/kota yang menjadi daerah basis dan 3 kabupaten/kota non basis sub sektor perikanan. Kabupaten/kota yang memiliki nilai rata-rata LQ tertinggi adalah Kabupaten Lamongan sebesar 7,81, Kabupaten Sumenep sebesar 5,89, dan Kabupaten Banyuwangi sebesar 3,89. Sedangkan daerah non basis meliputi Kabupaten Malang, Pasuruan, dan Sidoarjo.
2. Hasil analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) menunjukkan bahwa terdapat 11 kabupaten/kota yang berpotensi/berdaya saing di masa depan dan 3 kabupaten/kota yang tidak memiliki potensi/daya saing sub sektor perikanan. Kabupaten yang memiliki potensi/daya saing tertinggi adalah Kabupaten Blitar sebesar 1,40, Kabupaten Trenggalek sebesar 1,35, dan Kabupaten Probolinggo sebesar 1,34. Sedangkan daerah yang tidak memiliki potensi/daya saing sub sektor perikanan di masa depan adalah Kabupaten Sidoarjo, Sumenep, dan Kota Probolinggo.

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah khususnya bagi pemerintah kabupaten/kota Kawasan Minapolitan Provinsi Jawa Timur hendaknya lebih memperhatikan upaya untuk meningkatkan nilai tambah produksi bidang sub sektor perikanan terutama bagi kabupaten/kota yang belum menjadi wilayah basis/unggulan dalam bidang perikanan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain seperti; peningkatan sarana dan prasarana, sosialisasi dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, penyediaan modal bagi nelayan maupun pembudidaya, dan memberikan kebijakan yang tepat agar tidak terjadi penipisan atau pencemaran lahan budidaya yang berpengaruh terhadap hasil produksi.

2. Kepada masyarakat khususnya bagi nelayan maupun produsen hendaknya memanfaatkan sumber daya perikanan dengan bijaksana, yaitu dengan tidak melakukan eksploitasi dan kegiatan lainnya yang bersifat merusak sehingga lingkungan tetap terjaga kelestariannya. Selain itu, diperlukan adanya upaya masyarakat untuk mengembangkan usaha pengolahan ikan agar produksi yang dihasilkan tidak hanya dijual dengan kondisi segar melainkan juga dalam bentuk olahan sehingga akan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Adanya proses pelatihan dan pendampingan dapat membantu masyarakat untuk mengolah sumber daya ikan menjadi berbagai produk unggulan, sehingga usaha perikanan tidak hanya dipandang sebagai usaha sampingan melainkan sebagai peluang besar dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliana, K. F. (2014). Analisis Potensi Lokal di Wilayah Pesisir Kabupaten Kendal dalam upaya Mewujudkan Blue Economy. *Economics Development Analysis Journal*. 3(1) : 59-69.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. (2018). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2017*. Surabaya: BPS Jawa Timur.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur. (2018). Kompleksitas Zona Kawasan Konservasi Kabupaten Malang. <https://dkp.jatimprov.go.id/index.php/2018/12/14/kompleksitas-zona-kawasan-konservasi-kabupaten-malang/>. [Diakses pada 11 Juli 2019].
- Hardaningrum, F. (2015). Pengembalian Jalan Produksi Perikanan di Kabupaten Sidoarjo. *E-Jurnal Spirit Pro Patria*. 1(1) : 9-18.
- Huda, H. M., Y. L. Purnamadewi, dan M. Firdaus. (2012). Strategi Pengembangan Perikanan dalam Pembangunan Ekonomi Wilayah di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 387-407.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/ KEPMEN-KP/2013. *Penetapan Kawasan Minapolitan*. 2 Juli 2013. Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Pasuruan. (2017). Perikanan Tangkap. <https://www.pasuruankab.go.id/potensi-126-perikanan-tangkap-.html>. [Diakses pada 14 Juli 2019].
- Tarigan, Robinson. (2005). *Ekonomi Regional*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Jakarta.